

**TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**DANA BANTUAN SOSIAL OLEH PEJABAT NEGARA**  
**(STUDI PUTUSAN NO:29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST)**

**Albert Tandy**  
**03051190012**

**ABSTRAK**

Kasus korupsi di Negara Indonesia hingga saat ini semakin meningkat baik dalam jumlah besaran dana yang dikorupsi serta jumlah pelaku yang melakukan tindakan korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana terhadap korupsi dana bansos pada masa pandemi Covid-19 dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap korupsi dana bansos dimasa pandemi Covid-19 oleh Juliari P Batubara.

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu penggabungan antara unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris . Penulis akan memuat seluruh data yang telah diperoleh dari sumber resmi dan tepercaya dan kemudian akan dikaitkan dengan cara studi kepustakaan dengan berbagai cara.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa setelah dilakukannya studi putusan dalam perkara Juliari P Batubara. Penulis menilai bahwa hukuman terkait koruptor di Negara Indonesia belum berjalan dengan efektif berhubung dikaitkan dengan perkara Juliari P Batubara yang seharusnya mendapatkan tuntutan pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Covid-19. Pasal itu berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Namun dalam penjatuhan hukuman hakim seolah-olah tidak mementingkan kepentingan masyarakat.

**Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Dana Bantuan Sosial, Pejabat Negara.**

**CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION  
SOCIAL ASSISTANCE FUND BY STATE OFFICERS  
(STUDY OF DECISION NO: 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST)**

**Albert Tandy  
03051190012**

**ABSTRACT**

Corruption cases in Indonesia have so far increased both in terms of the amount of corrupted funds and the number of perpetrators who commit acts of corruption, especially those committed by state officials. This study aims to determine the criminal arrangements for corruption in social assistance funds during the Covid-19 pandemic and judges' considerations in imposing penalties on corruption in social assistance funds during the Covid-19 pandemic by Juliari P Batubara.

Normative-empirical legal research is a combination of elements of normative law which are then supported by additional data or empirical elements. The author will load all the data that has been obtained from official and trusted sources and will then be linked to the literature study in various ways.

The results of the study conclude that after conducting a study on the decision in the case of Juliari P Batubara. The author considers that the punishment for corruptors in Indonesia has not been carried out effectively due to its association with the Juliari P Batubara case which should have received the death penalty in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes (Tipikor Law) in case of alleged bribery related to social assistance Covid-19. That article reads: In the event that the criminal act of corruption as referred to in paragraph (1) is committed under certain circumstances, capital punishment can be imposed. However, in sentencing the judges did not seem to care about the interests of society.

**Keywords:** Corruption Crime, Social Assistance Funds, State Officials.